PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARATI INSPEKTORAT

Jln. SOEKARNO – HATTA (Belakang Kantor Bupati) Telp.(0753)466262 Fax.(0753)466170 Simpang Empat - Pasaman Barat 26366

KEPUTUSAN

INSPEKTUR KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PERSYARATAN KOMPETENSI APARATUR PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN PASAMAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA INSPEKTUR

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menjamin kualitas hasil pelaksanaan pengawasan intern yang profesional, efektif dan efisien perlu persyaratan kompetensi APIP dalam melakukan pengawasan intern di lingkungan Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Persyaratan Kompetensi APIP dalam pelaksanaan Pengawasan Intern di lingkungan Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat;

Mengingat

: 1.

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun Pokok -Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor Republik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian Dan Angka Kreditnya.
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
- 8. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 119 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat;
- 10. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Persyaratan Kompetensi Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan

Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat

KEDUA: Persyaratan Kompetensi Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah adalah rumusan persyaratan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam melakukan pengawasan yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap prilaku yang diperlukan untuk melaksanakan tugas secara

profesional di bidang pengawasan

KETIGA : Persyaratan Kompetensi Aparatur Pengawasan Intern

bertujuan untuk menjamin profesionalitas, independensi dan integritas Aparatur Pengawasan Intern serta meningkatkan hasil pengawasan yang

akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

KEEMPAT : Apabila dalam evaluasi yang dilakukan terhadap

Kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat terdapat hal-hal baru yang perlu disempurnakan, maka akan diadakan penyesuaian sebagaimana

mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Empat pada tanggal : 05 Januari 2021

INSPEKTUR

Drs. HARISMAN, NST Pembina Utama Muda/IV.c NIP. 19630813 198903 1 007 LAMPIRAN I: KEPUTUSAN INSPEKTUR

KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR : 41 TAHUN 2021 TANGGAL : 05 JANUARI 2021

PERSYARATAN KOMPETENSI APARATUR PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN PASAMAN BARAT

NO	JENIS PERSYARATAN	PERSYARATAN KOMPETENSI	KETERANGAN
1	AUDIT REGULER	AKUNTANSI	PENDIDIKAN
		MANAJEMEN	PENDIDIKAN
		HUKUM	PENDIDIKAN
		TEKNIK SIPIL	PENDIDIKAN
		TEKNIK ARSITEKTUR	PENDIDIKAN
		ILMU PEMERINTAHAN	PENDIDIKAN
		TEKNIK KOMPUTER	PENDIDIKAN
		SOSIAL POLITIK	PENDIDIKAN
		TEKNIK AUDIT PBJ	DIKLAT
		PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	DIKLAT
		TEKNIS PEMERIKSAAN	DIKLAT
2	AUDIT KETAATAN	AKUNTANSI	PENDIDIKAN
		MANAJEMEN	PENDIDIKAN
		HUKUM	PENDIDIKAN
		TEKNIK SIPIL	PENDIDIKAN
		TEKNIK ARSITEKTUR	PENDIDIKAN
		ILMU PEMERINTAHAN	PENDIDIKAN
		TEKNIK KOMPUTER	PENDIDIKAN
		SOSIAL POLITIK	PENDIDIKAN
		AUDIT KETAATAN BERBASIS RISIKO	DIKLAT
3	AUDIT KINERJA	AKUNTANSI	PENDIDIKAN
		MANAJEMEN	PENDIDIKAN
		HUKUM	PENDIDIKAN
		TEKNIK SIPIL	PENDIDIKAN
		TEKNIK ARSITEKTUR	PENDIDIKAN
		ILMU PEMERINTAHAN	PENDIDIKAN
		TEKNIK KOMPUTER	PENDIDIKAN
		SOSIAL POLITIK	PENDIDIKAN
		AUDIT KINERJA BERBASIS RISIKO	DIKLAT
4	EVALUASI SAKIP	AKUNTANSI	PENDIDIKAN
.	DVIIDOI OI IIII	MANAJEMEN	PENDIDIKAN
		HUKUM	PENDIDIKAN
		TEKNIK SIPIL	PENDIDIKAN
		TEKNIK ARSITEKTUR	PENDIDIKAN
		ILMU PEMERINTAHAN	PENDIDIKAN
		TEKNIK KOMPUTER	PENDIDIKAN
		SOSIAL POLITIK	PENDIDIKAN
		PROSEDUR EVALUASI	DIKLAT
5	REVIU RKA/LKPD/LAKIP	AKUNTANSI	PENDIDIKAN
	/BARJAS	MANAJEMEN	PENDIDIKAN
	,	HUKUM	PENDIDIKAN
		TEKNIK SIPIL	PENDIDIKAN
		TEKNIK ARSITEKTUR	PENDIDIKAN
		ILMU PEMERINTAHAN	PENDIDIKAN
		TEKNIK KOMPUTER	PENDIDIKAN
		SOSIAL POLITIK	PENDIDIKAN
		REVIU RKA	DIKLAT

	T	REVIU LKPD	DIKLAT
1	e	REVIU LAKIP	DIKLAT
		PROBITY AUDIT PBJ	DIKLAT
		AUDIT PBJ ELEKTRONIK	DIKLAT
6	PEMERIKSAAN KHUSUS	AKUNTANSI	PENDIDIKAN
0	PEMERIKSAAN KHUSUS	MANAJEMEN	PENDIDIKAN
		HUKUM	PENDIDIKAN
		TEKNIK SIPIL	PENDIDIKAN
		TEKNIK SIPIL TEKNIK ARSITEKTUR	PENDIDIKAN
		ILMU PEMERINTAHAN	PENDIDIKAN
			PENDIDIKAN
		TEKNIK KOMPUTER	PENDIDIKAN
		SOSIAL POLITIK	
		AUDIT INVESTIGATIF	DIKLAT
	ACIOMENICI (PENE AMENICANI	AUDIT PKKN	DIKLAT
7	ASISTENSI/PENDAMPINGAN	AKUNTANSI	PENDIDIKAN
		MANAJEMEN	PENDIDIKAN
		HUKUM	PENDIDIKAN
		TEKNIK SIPIL	PENDIDIKAN
		TEKNIK ARSITEKTUR	PENDIDIKAN
		ILMU PEMERINTAHAN	PENDIDIKAN
		TEKNIK KOMPUTER	PENDIDIKAN
		SOSIAL POLITIK	PENDIDIKAN
	MONIMODING	TEKNIS ASISTENSI	DIKLAT
8	MONITORING TL	AKUNTANSI	PENDIDIKAN
		MANAJEMEN	PENDIDIKAN
		HUKUM	PENDIDIKAN
		TEKNIK SIPIL	PENDIDIKAN PENDIDIKAN
		TEKNIK ARSITEKTUR ILMU PEMERINTAHAN	PENDIDIKAN
			PENDIDIKAN
		TEKNIK KOMPUTER	PENDIDIKAN
9	COCIALICACI/DIAMEN	SOSIAL POLITIK AKUNTANSI	PENDIDIKAN
9	SOSIALISASI/BIMTEK	The Control of the Co	PENDIDIKAN
		MANAJEMEN	PENDIDIKAN
		HUKUM TEKNIK SIPIL	PENDIDIKAN
		TEKNIK SIPIL TEKNIK ARSITEKTUR	PENDIDIKAN
		ILMU PEMERINTAHAN	PENDIDIKAN PENDIDIKAN
		TEKNIK KOMPUTER SOSIAL POLITIK	PENDIDIKAN
		TOT	DIKLAT
	3	TEKNIK MANAJEMEN	DIKLAT
		TEKNIK MANAJEMEN TEKNIK AUDIT PBJ	DIKLAT
		PEDOMAN PENGELOLAAN	DIKLAT
			DIKLAI
		KEUANGAN DAERAH	

INSPEKTUR >

Drs. HARISMAN, NST
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19630813 198903 1 007